

INSTRUMEN WORD

PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL I: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Berkaitan dengan penentuan kegiatan prioritas tanpa kriteria, ada analisis potensi hasil, analisis hasil dan kemampuan, analisis komparasi hasil, dan aplikasi teknologi informasi.				
1.	Tingkat I	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.		
2.	Tingkat II	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (<i>outcome</i>) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.		
3.	Tingkat III	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (<i>outcome</i>) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (<i>outcome</i>).		
4.	Tingkat IV	Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (<i>outcome</i>) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain.		
5.	Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (<i>outcome</i>) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.	- Penerapan aplikasi penunjang <i>e-planning</i> - Perencanaan telah dilakukan secara rutin serta dilakukan inputting melalui aplikasi yang telah disediakan dalam GRMS Provinsi Jawa Tengah. - Adapun capaian kegiatan juga telah dikontrol melalui aplikasi <i>E-Controlling</i> serta Rapat Pengendalian yang diselenggarakan setiap bulannya.	• Notulensi Penyusunan Renstra • Dokumen Renja dan RKA • Dokumen Rancangan awal Renja dan RKA Berbasis Sub Sub Kegiatan • Dokumen Renja berbasis Renstra (Renja kegiatan setahun, kegiatan tersebut ada di Renstra) • Dokumen <i>cascading</i>/ pohon kinerja (kertas kerja/pohon kinerja ... Tabel Bab 3, 4, dan 5 di Renstra) • Dokumen <i>screen shot</i> aplikasi, manual aplikasi

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL II: MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGDA				
Berkaitan dengan monitoring pelaksanaan tugas, sederhana tidak terstruktur, berkala fokus tertentu, berkala ber kriteria terstandar per kegiatan, berkala kriteria terstandar dengan umpan balik terdokumentasi, aplikasi teknologi informasi				
1.	Tingkat I	<i>Monitoring</i> dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur.		
2.	Tingkat II	<i>Monitoring</i> dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan.		
3.	Tingkat III	<i>Monitoring</i> dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.		
4.	Tingkat IV	<i>Monitoring</i> dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.		
5.	Tingkat V	<i>Monitoring</i> dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.	- Aplikasi penunjang <i>e-controlling</i>; - Adapun capaian kegiatan telah dikontrol melalui aplikasi <i>E-Controlling</i> serta Rapat Pengendalian yang diselenggarakan setiap bulannya; - Dilakukan Apel pengarahan oleh pimpinan setiap senin yang diikuti oleh seluruh pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah; - Telah disediakan <i>platform Whistleblowing System</i> pada Website sebagai bentuk monitoring dan kontrol dari masyarakat terhadap kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.	• Dokumen undangan, daftar hadir dan notulensi rapat <i>monitoring</i> • Dokumen regulasi <i>monitoring</i> (waktu dan muatan), hasil <i>monitoring</i> (<i>print-out</i> realisasi fisik, keuangan dan kinerja) • Dokumen capaian realisasi fisik kegiatan $\leq$ 5% dengan dilengkapi dokumen tindak lanjut • Dokumen hasil tindak lanjut <i>monitoring</i> (laporan kepada Pimpinan berupa telaah/laporan, dokumen paket kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan) • Dokumen <i>screen shot</i> aplikasi, manual aplikasi

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIEBEL III: PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH				
Berkaitan dengan penjaminan mutu produk dan proses, tanpa penjaminan mutu, berkala internal tanpa standar, berkala internal berstandar, berkala eksternal berstandar pengujian tenaga bersertifikat, dan aplikasi teknologi informasi				
1.	Tingkat I	Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.		
2.	Tingkat II	Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan.		
3.	Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.	- Penjaminan mutu berkala internal berstandar dengan pengujian berkala - Dilakukan rapat Pengendalian secara rutin guna mengukur capaian kinerja Instansi setiap Bulannya - Dilakukan pula Apel rutin setiap pagi untuk memberikan arahan langsung kepada pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya - Dilakukan Evaluasi Tahunan untuk mengetahui kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun serta untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki di tahun selanjutnya.	• Dokumen paraf pelaksanaan tugas/kegiatan, telaah staf, rapat teknis internal • Dokumen SPP, SOP, rapat teknis internal, hasil evaluasi, <i>second opinion</i> ahli
4.	Tingkat IV	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.		
5.	Tingkat V	Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.		

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL IV: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH				
Berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, tanpa definisi proses, ada proses dalam SOP, evaluasi berkala SOP, tindak lanjut evaluasi SOP/ SOP revisi, dan SOP akomodasi kebutuhan pelanggan pakai aplikasi teknologi informasi				
1.	Tingkat I	Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah.		
2.	Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).		
3.	Tingkat III	Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP.		
4.	Tingkat IV	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.		
5.	Tingkat V	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.	- Ada SOP, dievaluasi berkala, sudah direvisi disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan menggunakan teknologi informasi - Dilakukan evaluasi terhadap setiap aturan yang mengatur pelaksanaan tugas fungsi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	• Dokumen daftar SOP yang sudah ditetapkan; daftar SOP yang seharusnya ada • Dokumen pemberitahuan adanya evaluasi SOP; rapat evaluasi SOP; laporan hasil evaluasi (nota dinas atau buku laporan) • Dokumen SOP yang direvisi; rekap SOP yang direvisi; kesesuaian hasil monev dengan dokumen revisi • Dokumen pelaksanaan SOP, penyampaian informasi SOP, monev SOP (IT SOP), input pelanggan (internal) atas SOP (SOP Online), screen shot aplikasi SOP, manual SOP elektronik

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL V: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR				
Berkaitan dengan pelaksanaan diklat, tanpa rencana kebutuhan, ada rencana kebutuhan parsial, rencana kebutuhan komprehensif, evaluasi regular rencana kebutuhan, dan evaluasi <i>outcome</i> sampai <i>feedback</i>				
1.	Tingkat I	Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan.		
2.	Tingkat II	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.		
3.	Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.		
4.	Tingkat IV	Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.		
5.	Tingkat V	Hasil (<i>outcome</i>) pengembangan pegawai dievaluasi secara regular sebagai umpan balik.	- Evaluasi regular <i>outcome</i> diklat, ada rekomendasi dan tindak lanjut - Dilakukan inventarisasi kebutuhan diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya guna mendukung serta meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	• Dokumen rencana kebutuhan diklat (daftar nama, alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat tugas diklat, dan lain-lain • Dokumen idem (bedanya lebih komplit) • Dokumen monev diklat, tingkat capaian diklat • Dokumen revisi rencana pengembangan diklat secara periodik (sesuai analisis kebutuhan diklat)

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL VI: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH				
Berkaitan dengan analisis kebijakan dan pemecahan masalah, sederhana tidak terukur, ada tim internal, teknik/ metode ilmiah oleh tim internal lintas instansi, tim ahli, dan konsultasi publik untuk analisis umpan balik terukur				
1.	Tingkat I	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur.		
2.	Tingkat II	Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan.		
3.	Tingkat III	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait.	- Analisis kebijakan berdampak publik oleh tim internal pakai metode/ teknik ilmiah dan lintas instansi - Dilakukan kajian terhadap kebijakan yang masih berlaku apakah masih dapat digunakan kembali atau tidak - Adanya usulan SOTK baru dengan menambahkan Seksi Pemadam Kebakaran pada Bidang Pembinaan Satlinmas - Dilakukan Penyesuaian jabatan sesuai dengan kelas jabatan masing-masing pegawai yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan	• Dokumen telaah staf, hasil ratek internal • Dokumen SK Tim Khusus (internal OPD), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan kajian • Dokumen SK Tim Teknis (lintas OPD), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan kajian
4.	Tingkat IV	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/ berdampak ke publik melibatkan tim ahli.		
5.	Tingkat V	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/ berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.		

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL VII: MANAJEMEN SUMBER DAYA YANG TERUKUR				
Berkaitan dengan analisis kebutuhan penggunaan sumber (<i>man, money, material</i>), secara legal formal, ada analisis kebutuhan, terstandar pakai uji terbuka dan metode ilmiah, monitor input, SOP, penjaminan mutu, dan aplikasi teknologi informasi				
1.	Tingkat I	Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku.		
2.	Tingkat II	Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumberdaya yang sudah ditetapkan.		
3.	Tingkat III	Analisis kebutuhan input/ sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses uji coba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.		
4.	Tingkat IV	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumberdaya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk.		
5.	Tingkat V	Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.	- Ada monitoring penyediaan sumber daya, terstandar, ada SOP dan penjaminan mutu, pakai aplikasi teknologi informasi (monev elektronik) - Dilakukan pengukuran capaian kinerja instansi melalui setiap aplikasi yang disiapkan oleh GRMS Provinsi Jawa Tengah salah satunya dengan <i>e-controlling</i>	• Dokumen aturan formal sumber daya (<i>man, money, material</i>) • Dokumen analisis kebutuhan anggaran (Pergub standarisasi harga), tenaga (Tusi, data pegawai), dan material/ sarpras (daftar inventaris dan aset) • Dokumen ASB, Anjab, ABK, dan material (analisis kebutuhan barang) • Dokumen monev penyediaan sumber daya, SOP, penjaminan mutu (<i>man, money, material</i>) • Dokumen <i>screen shot</i> aplikasi, manual aplikasi

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL VIII: MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR				
Berkaitan dengan manajemen risiko pelaksanaan tugas, tanpa manajemen risiko, ada terbatas tugas individual, prosedur tugas berisiko tinggi, semua tugas tanpa evaluasi berkala, risiko dapat dikendalikan tanpa kerugian				
1.	Tingkat I	Belum ada manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.		
2.	Tingkat II	Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis risiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu.		
3.	Tingkat III	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi.		
4.	Tingkat IV	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.		
5.	Tingkat V	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas serta semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.	- Ada pengelolaan risiko seluruh kegiatan, risiko terkendali tanpa kerugian pegawai dan instansi - Telah dibentuk tim SPIP yang telah menyusun manajemen risiko di Satpol PP Provinsi Jawa Tengah - Telah disediakan <i>platform Whistleblowing System</i> pada Website sebagai bentuk monitoring dan kontrol dari masyarakat terhadap kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.	• Dokumen Register Risiko seluruh kegiatan (komprehensif) sesuai Tujuan Sasaran Renstra dengan klasifikasi: - Risiko Strategis Pemda - Risiko Organisasi/ Strategis OPD - Risiko Operasional OPD • Persentase kegiatan utama $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$, jumlah kegiatan pendukung 3 (tiga) • Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP, (laporan pengendalian OPD/ Realisasi RTP), RTP telah diupdate, persentase kegiatan utama 100%, jumlah kegiatan pendukung 4 (empat) atau lebih, persentase TLHP: 100%.

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL IX: PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR				
Berkaitan dengan pengukuran kinerja perangkat daerah, tanpa target kinerja, target belum sesuai rencana, target konsisten rencana, target telah diukur kinerjanya, capaian target di atas 90% dan pakai aplikasi teknologi informasi				
1.	Tingkat I	Belum ada target/ rencana kinerja perangkat daerah yang terukur.		
2.	Tingkat II	Sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah.		
3.	Tingkat III	Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan.		
4.	Tingkat IV	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.		
5.	Tingkat V	Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.	- Ada pengukuran tingkat capaian kinerja, sudah mencapai di atas 90%, pakai aplikasi teknologi informasi - Telah dilakukan tindak lanjut dari evaluasi SAKIP tahun 2020 - Telah disusun Tim Penilaian Kinerja Pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	• Dokumen PK dan Renstra (sudah konsisten) • Dokumen LKJIP dan LHE SAKIP • Dokumen LKJIP dan LHE SAKIP dengan capaian kinerja di atas 90%, <i>screen shot</i> aplikasi kinerja, manual aplikasi (e-SAKIP dan e-Kinerja)

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL X: PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH				
Berkaitan dengan pengembangan inovasi pelayanan, tanpa rencana sistematis, ada adopsi/ replikasi, rencana jenis mutu metode inovasi, invensi (temuan) lokal, program kajian inovasi terencana berkelanjutan				
1.	Tingkat I	Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.		
2.	Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).		
3.	Tingkat III	Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.		
4.	Tingkat IV	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan.		
5.	Tingkat V	Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.	- Ada program pengkajian dan rencana inovasi berkelanjutan (komprehensif) - Telah dilakukan integrasi antara aplikasi Pantau Gakprotkes dengan aplikasi SIM Pol PP milik Kemendagri dengan tujuan untuk mengurangi inputing data Pantauan Pelaksanaan PPKM secara ganda pada dua aplikasi yang memiliki fungsi sama - Telah disediakan <i>platform Whistleblowing System</i> pada Website sebagai bentuk monitoring dan kontrol dari masyarakat terhadap kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.	• Dokumen proposal inovasi, <i>screen shot</i> aplikasi inovasi, dan lain-lain • Dokumen list adopsi/ replikasi inovasi • Dokumen daftar invensi (temuan) inovasi lokal • Dokumen <i>roadmap</i> pengembangan inovasi, SK Tim Inovasi (kegiatan dan hasil)

NO.	KEMATANGAN	INDIKATOR	PENJELASAN	DATA DUKUNG
VARIABEL XI: BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH				
Berkaitan pembentukan budaya organisasi, tanpa budaya organisasi, ada slogan nilai organisasi, dokumen resmi nilai sikap perilaku, proram internalisasi berkelanjutan, dan realiasi budaya organisasi hasil evaluasi rutin berkelanjutan				
1.	Tingkat I	Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah.		
2.	Tingkat II	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.		
3.	Tingkat III	Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.		
4.	Tingkat IV	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.	- Ada dokumen resmi program internalisasi budaya organisasi berkelanjutan - Telah disediakan <i>platform Whistleblowing System</i> pada Website sebagai bentuk monitoring dan kontrol dari masyarakat terhadap kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. - Telah dibentuk Tim Budaya Kerja serta Agen Perubahan di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	• Dokumen slogan organisasi tertuang dalam bentuk media cetak dan non cetak • Dokumen SK Penetapan Nilai Budaya Organisasi, SK KBK/ GKM, SK <i>Agent of Change</i>, dan lain-lain • Dokumen rencana (program) pengembangan budaya organisasi, kegiatan sosialisasi, sarasehan, expo, bintek, lomba, dan ain-lain
5.	Tingkat V	Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.		